

PEMBERDAYAAN LKMD BAGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL

(Studi Kasus di Kota Gorontalo)

USMAN KAHARU*

MARSUKI**

LALY. D. SIREGAR**

ABSTRACT

The study is aimed to describe the empowering of the institution and influential factors on the development of the local society in Gorontalo. It is hoped that recommendations related to the empowering of the institution can be revealed viewed from the planning, implementation and control. The data were collected through observation, questionnaire, and interview. The data were analyzed descriptively (qualitatively) and triangularly. The results of the study indicate that the empowering of the institution is encouraging which is shown by their efforts in making plan, implementing, and controlling the development plan after having been discussed by utilizing various available potentials. With regard to its empowering, the institution is always trying to adjust the will and the social condition, although in fact there is a policy from the village chief besides the limited ability of its personnel. The main factor affecting the empowering of the institution is the quality of the human resources, welfare, and moral. Whereas the third influencing factor is other resources. The factors mentioned above tend to affect work opportunity, dissemination of income, and improvement of their income which is temporary and limited to those who have a particular skill only.

PENDAHULUAN

Keberadaan LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat diatur dalam keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 1984.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang pengelolaannya melalui wadah LKMD semakin dirasakan. Hal ini dimungkinkan karena di desa/kelurahan terdapat berbagai potensi disamping harapan-harapan yang mereka inginkan.

Keterlibatan tersebut, juga didukung oleh Blakely (1991 : 60) yang mengatakan bahwa : "Local government, community institutions and the private sector are essential partners in the economic development process".

Pandangan Blakely sejalan pula dengan paradigma baru pembangunan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah pembangunan di suatu daerah, harus dilakukan melalui institutional radicalization, yaitu kembali ke akar kelembagaan yang tumbuh (berada) di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Dihubungkan dengan agenda 21, masyarakat di desa/kelurahan yang dalam penelitian ini disebut masyarakat lokal, perlu diberdayakan sebagai subyek yang memberantas kemiskinannya dan melestarikan lingkungannya (Poli ; 1998 : 7).

* Staf Pengajar STIKIP Gorontalo

** Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Kelembagaan yang ada di kelurahan dalam hal ini LKMD perlu diberdayakan dalam rangka pembangunan masyarakat lokal baik dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Jika tidak, maka pembangunan tersebut pasti akan sia-sia karena tidak sesuai dengan kondisi setempat. Melihat ketidaksesuaian sebagaimana yang disinyalir di kota Gorontalo merupakan gejala yang tampak dimana peneliti menduga bahwa gejala yang tampak tadi dipengaruhi oleh pola pikir (yang tidak tampak) yakni pemberdayaan.

Selanjutnya dengan mengetahui pemberdayaan LKMD, diharapkan akan turut diketahui pula tingkat keberdayaan maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan LKMD kota Gorontalo bagi pembangunan masyarakat lokal.
2. Apakah tingkat keberdayaan LKMD sesuai dengan kehendak dan kondisi (potensi) setempat.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan LKMD; dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

Khusus dalam hal pemberdayaan mencakupi tiga dimensi (Poli, 1997 / 1998 : 10) yaitu :

1. Peningkatan kesatuan visi dalam hak melihat sifat dan luarnya masalah.
2. Peningkatan kemampuan yang mencakupi peningkatan 5 M yaitu men, machine, material, method dan money.
3. Peningkatan integritas yaitu satunya perkataan dengan perbuatan.

Sedangkan pembangunan masyarakat lokal akan dilihat dari tiga sasaran pokoknya (Poli, 1994 / 1995 : 5) yaitu :

1. Perluasan kesempatan kerja
2. Pemerataan pendapatan
3. Peningkatan pendapatan

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pemberdayaan LKMD dan tingkat keberdayaan

serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi pembangunan masyarakat lokal di kota Gorontalo. Juga diharapkan akan terungkap saran-saran yang berhubungan dengan pemberdayaan itu sendiri dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (kualitatif) yang dilaksanakan di kota Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 3 Kecamatan atau 45 Kelurahan.

Jenis data yang dikumpulkan di samping data primer juga data sekunder yang diperoleh dari sampel, responden maupun instansi terkait.

Cara untuk memperoleh data, melalui observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, kuesioner maupun dokumentasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah LKMD (pemberdayaannya). Sedangkan yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus LKMD sekaligus sebagai populasi. Berhubung subyek penelitian ini tersebar di wilayah yang begitu luas dan jumlahnya cukup banyak, maka ditariklah sampel dengan menggunakan sampel bertujuan (purposive sample). Caranya ialah dari 45 kelurahan, sampelnya ditetapkan 20 % yakni 9 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan yang ditarik secara proporsional yang hasilnya 4 kelurahan di kota selatan, 3 kelurahan di kota utara dan 2 kelurahan di kota barat. Pengambilan sampel di masing-masing kecamatan dilakukan secara random. Cara pengambilan sampel dari 9 kelurahan ialah dengan menetapkan seorang dari pengurus LKMD yakni ketua. Alasannya ialah karena personil dalam jabatan ini dinilai merupakan key subjects sebagaimana dikemukakan Arikunto (1989 ; 113) antara lain "subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjects)".

Di lapangan, populasi ini bertambah seorang sehingga seluruhnya menjadi 10 orang, sedangkan respondennya (diluar sampel) 4

orang yang ditentukan secara sengaja (purposive) yang terdiri dari tokoh pendidik, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif (kualitatif) yang proses penganalisaan datanya dilakukan secara berurutan yakni pengorganisasian data, reduksi data dan penafsiran data.

Analisis tersebut sejalan pula dengan pola pengamatan yang dikemukakan Poli (1998 : 4) yakni menggunakan pola 4W, 5W dan triangulation. Yang dimaksud dengan triangulation di sini adalah usaha menarik kesimpulan dari masukan yang diperoleh dari tiga sumber. Jawaban dari responden pertama diuji dengan jawaban dari responden lainnya. Ketiga jawaban dari "why" dapat berbentuk

methodological note, theoretical note dan hypothesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan LKMD

Pemberdayaan yang dibahas dalam uraian ini disesuaikan dengan persoalan penelitian yang dikaji dari tiga dimensi yaitu peningkatan kesatuan visi dalam hal melihat sifat dan luasnya masalah; peningkatan kemampuan yakni men, machine, material, method dan money; dan peningkatan integritas yaitu satunya kata dengan perbuatan, baik yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

Khusus pemberdayaan yang dilihat dari segi perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Perencanaan

Dimensi Pemberdayaan	Wujud Keberdayaan	Saran yang Diperoleh dari Responden
Peningkatan Kesatuan Visi	1. Rapat/musyawah LKMD 2. Berkonsultasi dengan pembina/pejabat terkait, tokoh masyarakat. 3. Mensahkan perencanaan yang telah disepakati.	Perlunya pemahaman bersama tentang makna rapat/musyawah/konsultasi serta perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk kehadiran/aktivitas.
Peningkatan Kemampuan	1. Menginventarisir masalah dan potensi. 2. Menetapkan masalah yang paling pokok serta potensi yang ada maupun yang diupayakan.	Perlunya peningkatan pengetahuan pengurus sehingga mampu menginventarisir masalah, potensi yang ada maupun yang diupayakan.
Peningkatan Integritas	Pencantuman hasil rapat/musyawah dalam bentuk matriks.	Penyebaran informasi tentang hasil rapat/musyawah.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan kesatuan visi, LKMD telah mengedepankan dialog untuk mencapai suatu kesepakatan, dimana hal ini mereka menyadari akan perlunya pemahaman yang hakiki di dalamnya.

Dalam hal peningkatan kemampuannya, LKMD cukup memahami perlunya untuk mengetahui berbagai masalah yang harus diatasi sedini mungkin dengan memperhatikan potensi-potensi yang diharapkan dapat dimanfaatkan guna mengatasi masalah tersebut.

Mereka menyadari sepenuhnya pula bahwa untuk hal ini, diperlukan pengetahuan yang memadai.

Dalam rangka menghindari kemungkinan timbulnya penyimpangan, sekaligus agar setiap penyelenggaraan pembangunan itu lebih terarah sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka LKMD membuat semacam matriks sejak awalnya, sebelum proyek pembangunan tersebut dilaksanakan,

dimana matriks dimaksud dirasa perlu pula untuk diketahui oleh masyarakat.

Bila dilihat dari segi pelaksanaan, walaupun LKMD turut melaksanakannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya disamping sering berkonsultasi dengan pembina, namun dalam hal ini mereka tetap merasakan berbagai kendala baik yang ada hubungannya dengan personil sesama pengurus maupun sumber daya itu sendiri yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Pelaksanaan

Dimensi Pemberdayaan	Wujud Keberdayaan	Saran yang Diperoleh dari Responden
1	2	3
Peningkatan Kesatuan Visi	Melaksanakan proyek pembangunan sesuai urgensi dan wewenang	Perlu peningkatan kepedulian pengurus dalam memahami segala peraturan yang berkaitan dengan LKMD.
Peningkatan Kemampuan	Memanfaatkan segala sumber daya yang ada semaksimal mungkin.	Perlu peningkatan segala sumber daya baik intern maupun ekstern.
Peningkatan Integritas	Melaksanakan proyek pembangunan sambil tetap berkonsultasi dengan pembina.	Perlu peningkatan pengetahuan pengurus terutama dalam soal-soal teknis pelaksanaan pembangunan.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari data primer ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan kesatuan visi, LKMD turut melaksanakan program pembangunan yang dilimpahkan kepadanya sesuai rencana. Namun di lain pihak, mereka menyadari pula dalam rangka pelaksanaan program ini, perlu ketelibatan semua pihak (sesama pengurus) secara aktif sekaligus menguasai berbagai ketentuan yang ada, agar pelaksanaan proyek pembangunan tersebut benar-benar merupakan perwujudan kebersamaan.

Dalam hal peningkatan kemampuannya, maka dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan, LKMD berusaha untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, baik personil, dana serta sumber daya lainnya. Kendala yang sering dihadapi oleh LKMD

adalah keterbatasan sumber daya yang ada diperhadapkan dengan kebutuhan.

Untuk menciptakan keharmonisan pelaksanaan proyek pembangunan, LKMD tetap menjalankan fungsinya dalam bentuk dialog dengan pembina. Hal ini dikandung maksud, untuk menghindari kemungkinan salah urus, yang mengakibatkan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya. Tindakan seperti ini merupakan bagian awal dari pengendalian.

Bila dilihat dari segi pengendalian, maka sebagai wujud pemberdayaannya dalam hal peningkatan kesatuan visi, LKMD turut melaksanakan pengendalian bersama institusi/lembaga lainnya sesuai fungsinya. Pengendalian ini lebih banyak dilaksanakan oleh seksi terkait dalam tubuh LKMD yang pada

gilirannya sebagai wujud rasa tanggung jawab moralnya kepada masyarakat setempat.

Sesuai penelitian, LKMD menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka pengendalian ini, mereka kurang bahkan tidak memiliki kewenangan yang berarti. Kenyataan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut selama ini lebih didominasi oleh lurah/pembina

maupun instansi terkait dengan proyek pembangunan, kecuali proyek itu benar-benar swadaya murni masyarakat. Juga diakuinya bahwa faktor profesi yang handal serta kejujuran turut mewarnai keberdayaan dilihat dari segi pengendalian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Pengendalian

Dimensi Pemberdayaan	Wujud Keberdayaan	Saran yang Diperoleh dari Responden
1	2	3
Peningkatan Kesatuan visi	Turut mengendalikan pelaksanaan proyek pembangunan yang telah direncanakan.	Perlu peningkatan kewenangan dalam pengendalian, yang selama ini terkesan lebih didominasi oleh lurah/instansi terkait
Peningkatan kemampuan	Mengedepankan seksi terkait dalam pengendalian.	Personil pada seksi terkait perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pengendalian.
Peningkatan integritas	Secara moral telah turut mengendalikan, ditandai penandatanganan berita acara	Semua pihak perlu bersikap jujur/transparan dalam sikap dan tindakannya

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari tabel ini perlu dijelaskan lagi bahwa dalam rangka kesatuan visi sebagai salah satu dimensi pemberdayaan, masih diperlukan peningkatan kewenangan dalam pengendalian. Kewenangan tersebut memerlukan dasar hukumnya secara jelas dimana selama ini terkesan tidak nampak. Dengan adanya dasar hukum tersebut akan bermakna yang sangat strategis dalam penciptaan kesatuan visi terhadap pembangunan pada umumnya. Disamping itu akan memicu kesiapan personil LKMD yang handal di bidang pengendalian yang mengacu pada hasil pelaksanaan pembangunan yang betul-betul sesuai rencana sekaligus harapan masyarakat.

2. Tingkat Keberdayaan LKMD

Yang dimaksud dengan tingkat keberdayaan dalam uraian ini dilihat pada

kesesuaian kehendak maupun kondisi (termasuk sumber dana) dalam rangka pemberdayaan LKMD.

Semua memaklumi bahwa kebutuhan manusia baik secara perorangan maupun kelompok adalah tidak terbatas, diperhadapkan dengan alat pemuas yang serba terbatas. Hal seperti ini juga disadari oleh LKMD. Dalam menghadapi berbagai tuntutan masyarakat agar segala kebutuhan dapat terpenuhi melalui wadah LKMD, maka lembaga ini tetap menghargai harapan tersebut yang diupayakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Untuk itulah maka ditempuh berbagai cara dan daya sebagai perwujudan tingkat keberdayaannya yang bila dilihat dari segi perencanaan adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Tingkat Keberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Perencanaan

Kesesuaian dengan Kehendak	Kesesuaian dengan Kondisi(Sumber Daya)	Saran yang Diperoleh dari Responden
1	2	3
Selalu disesuaikan disamping tetap memperhatikan kebutuhan yang paling mendesak, peraturan serta pengarahannya melalui rapat/musyawarah/konsultasi	Selalu disesuaikan dengan sumber daya yang ada maupun yang diharapkan akan ada (misalnya gotong royong/partisipasi)	Diperlukan kejelasan dalam memilih/menetapkan skala prioritas kebutuhan, kemampuan merencanakan termasuk perhitungan anggaran seobyektif mungkin.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari tabel ini perlu dijelaskan lagi bahwa bila disimak tingkat keberdayaannya, pada prinsipnya LKMD berusaha menampung berbagai kehendak anggota masyarakat yang mengajukan berbagai harapan dan atau tuntutan sebagai perwujudan kesesuaian kehendak, yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan. Agar tercipta kesesuaian yang diharapkan, LKMD berusaha memilih dan memilih kebutuhan yang paling mendesak dengan tetap mengacu pula pada peraturan yang berlaku maupun pembinaan.

Kebijakan seperti ini juga dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ternyata LKMD juga telah memiliki kemampuan pada tingkat tertentu yang tercermin pada keinginan untuk memilih/menetapkan skala prioritas kebutuhan, perencanaan maupun teknis perhitungan anggaran seobyektif mungkin yang harus dimilikinya.

Dilihat dari segi pelaksanaan, data dari sampel menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan selalu berorientasi pada kesesuaian dengan kehendak maupun sumber daya yang ada walaupun sering ada kebijakan-kebijakan tersendiri dari lurah/pembina yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tingkat Keberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Pelaksanaan

Kesesuaian dengan Kehendak	Kesesuaian dengan Kondisi (Sumber Daya)	Saran yang diperoleh dari Responden
1	2	3
Selalu disesuaikan yang walaupun pada prakteknya sering ada kebijakan tersendiri dari pembina/lurah	Selalu disesuaikan sekaligus diupayakan peningkatannya baik secara intern maupun ekstern	Perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya pada LKMD dalam menetapkan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pembina/lurah.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari tabel ini perlu dijelaskan lagi bahwa sesuai pengalaman responden, penyesuaian tersebut perlu ditempuh dengan

maksud untuk menyeimbangkan berbagai tuntutan dan sumber daya yang ada. Namun karena sering ada hal-hal yang perlu beroleh

kebijakan khusus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terutama dari pihak lurah/pembina, maka teknis pelaksanaan otomatis mengalami perubahan yang kadang-kadang sifatnya mendasar. Dalam rangka menghadapi kendala seperti ini, LKMD mengharapkan agar mereka patut diberikan kewenangan tertentu dalam batas-batas yang

wajar untuk mengatasi kendala dimaksud, agar pelaksanaan suatu proyek yang telah direncanakan, betul-betul sesuai harapan atau kebijakannya tidak terlalu menyimpang jauh.

Dilihat dari segi pengendalian, tingkat keberdayaan LKMD pada umumnya kurang sesuai dengan kehendak maupun sumber daya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6. Tingkat Keberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Pengendalian.

Kesesuaian dengan Kehendak	Kesesuaian dengan Kondisi (Sumber Daya)	Saran yang diperoleh dari Responden
1	2	3
Pada umumnya kurang sesuai karena adanya keterbatasan kewenangan dalam tubuh LKMD	Pada umumnya kurang sesuai karena keterbatasan kemampuan personil (sumber daya manusianya)	Perlu diberikan kewenangan seluas-luasnya kepada LKMD dalam mengendalikan, sekaligus peningkatan kemampuannya secara teknis maupun administratif.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Berdasarkan data yang dituangkan dalam tabel di atas perlu dijelaskan lagi bahwa ketidaksesuaian dengan kehendak LKMD dimaksud ialah karena kewenangan pengendalian kenyataannya lebih didominasi oleh lurah/pembina sementara di satu pihak, LKMD ingin turut mengendalikannya secara aktif dan dinamis yang didasarkan pada pertimbangan bahwa merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan kehendaki. Namun di lain pihak kenyataan menunjukkan bahwa LKMD diperhadapkan pada keterbatasan sumber daya manusianya disamping kewenangan yang terbatas.

Namun hal tersebut tidak menutup keinginannya untuk tetap memperhatikan

pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan walaupun mereka sendiri memerlukan personil pengurus yang handal secara teknis maupun administratif di bidang pengendalian.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan LKMD

Dalam rangka pemberdayaan LKMD, para responden sempat mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Faktor-faktor tersebut pada hakekatnya tertuju kepada 3 unsur yang untuk mengungkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengendalian.

Unsur Pengurus	Unsur Pembina	Unsur Sumber Daya/Lainnya
1	2	3
1. Tingkat pendidikan 2. Pengalaman 3. Kepemilikan buku peraturan/pedoman 4. Kepemimpinan 5. Usia 6. Etnis/budaya 7. Mekanisme pembinaan 8. Kesejahteraan 9. Kejujuran 10. Keikhlasan	1. Tingkat pendidikan 2. Pengalaman 3. Kepemimpinan 4. Usia 5. Etnis/budaya 6. Mekanisme pembinaan 7. Penguasaan materi dan metode pembinaan 8. Penguasaan lokasi/situasi lapangan 9. Kekompakan dalam pembinaan 10. Kontinuitas pembinaan	Terbatas dan beragam baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan terdapat banyak persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan LKMD bagi unsur pengurus maupun pembina.

Sesuai hasil penelitian sebagaimana dalam tabel tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa pengurus LKMD telah cukup berani mengungkapkan hal-hal yang selama ini sering dirasa tabu, khususnya terhadap unsur pembina.

Selanjutnya faktor lain yang turut mempengaruhi pemberdayaan LKMD adalah

keterbatasan dan beragamnya sumber daya, baik menyangkut manusianya dilihat dari segi kualitas dan kuantitas maupun alam lingkungan, dana (termasuk sumber dana baik dari pemerintah maupun relawan).

Keadaan seperti ini, cukup dipahami pengurus LKMD, dimana mereka sempat mengutarakan pula berbagai saran guna mengatasi faktor-faktor tadi yang pada gilirannya mencakupi segi-segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 8. Saran-Saran Untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Segi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian.

Unsur Pengurus	Unsur Pembina	Unsur Sumber Daya/Lainnya
1. Tingkat pendidikan dan pengalamannya yang memadai 2. Kepemilikan buku/ brosur peraturan yang relevan 3. Kesejahteraan 4. Keikutsertaan secara aktif dalam pembinaan, penataran, pelatihan, diskusi dan seminar. 5. Peningkatan rasa kepedulian secara ikhlas, jujur dan bertanggung jawab.	1. Tingkat pendidikan dan pengalamannya yang memadai 2. Kepemimpinan dan manajerial yang konsisten 3. Peningkatan mekanisme pembinaan 4. Peningkatan penguasaan materi dan metode pembinaan 5. Peningkatan penguasaan lokasi/ situasi lapangan 6. Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk team work yang kompak dan berkelanjutan	1. Menginventarisir berbagai masalah dan potensi yang ada maupun yang mungkin akan ada semaksimal mungkin. 2. Memanfaatkan berbagai potensi yang ada semaksimal mungkin 3. Mengatasi/meredam berbagai masalah yang ada yang dinilai berekses negatif, semaksimal mungkin 4. Mencari sumber daya lain.

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Patut dibanggakan bahwa hasil penelitian ini disampaikan oleh para responden secara terbuka, yang selanjutnya mereka juga menyampaikan saran-sarannya yang secara implisit telah mereka pikirkan dapat memperbaiki pemberdayaan LKMD bagi pembangunan di wilayahnya. Saran-saran tersebut terbagi ke dalam tiga unsur. Dua unsur pertama yakni pengurus dan pembina mempunyai banyak persamaannya yang lebih terfokus pada sumber daya manusianya.

Sedangkan pada unsur yang ketiga yakni sumber daya lainnya lebih tertuju pada fungsi LKMD dalam kegiatan pembangunan masyarakat lokal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya baik yang menyangkut pemberdayaan maupun tingkat keberdayaan LKMD, keduanya berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat lokal khususnya dilihat dari tiga sasaran pokok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Pengaruh Pemberdayaan LKMD Dilihat dari Tiga Sasaran Pokok Pembangunan Masyarakat Lokal

Sasaran Pokok	Wujudnya	Saran yang Diperoleh
1. Perluasan kesempatan kerja	Hanya sewaktu-waktu saja (sifatnya temporer) sesuai keberadaan proyek.	Perlu pilot project yang mampu menyerap tenaga kerja secara multi dimensional
2. Pemerataan pendapatan	Sangat terbatas karena pada umumnya proyek-proyek itu lebih bersifat sosial.	Diharapkan adanya proyek-proyek yang bersifat ekonomis
3. Peningkatan pendapatan	Hanya terbatas pada mereka yang memiliki keterampilan/sumber daya yang termanfaatkan	Diharapkan adanya pemerataan pendidikan dan pelatihan keterampilan (bengkel kerja)

Sumber : Data primer setelah diolah peneliti dari hasil wawancara

Pada tabel tersebut di atas masih perlu dijelaskan lagi bahwa pemberdayaan LKMD yang sasarannya perluasan kesempatan kerja yang perwujudannya hanya sewaktu-waktu, hal ini disebabkan karena LKMD lebih banyak menggantungkan dirinya pada dana proyek yang diturunkan oleh pemerintah. Bahkan seluruh LKMD belum ada yang mampu menciptakan secara mandiri suatu kegiatan yang dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja maupun pemerataan pendapatan serta peningkatan pendapatan.

Namun responden sempat mengemukakan bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja perlu diciptakan pilot project kerja sama dengan perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam rangka pemerataan pendapatan, kenyataannya memang sangat terbatas karena proyek-proyek pembangunan lebih banyak yang bersifat sosial, sedangkan yang bersifat ekonomis melalui dana IDT, JPS agaknya belum mampu menciptakan pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja yang berarti, apalagi peningkatan pendapatan.

Diakui oleh para responden bahwa walaupun ada peningkatan pendapatan sebagai akibat pengaruh pemberdayaan LKMD, namun hanya terbatas pada mereka yang memiliki keterampilan tertentu yang mungkin pula orang (personil) tersebut berada di luar kelurahannya.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Pemberdayaan LKMD Kota Gorontalo bagi pembangunan masyarakat lokal di lihat dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian telah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Hal ini ditandai adanya upaya mereka dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan setelah melewati proses pertemuan, rapat atau musyawarah. Kegiatan seperti ini sebagai perwujudan upaya meningkatkan kesatuan visi dalam

hal melihat sifat dan luasnya masalah, sekaligus memecahkannya.

- b. Dalam rangka peningkatan kemampuannya, LKMD Kota Gorontalo selalu berusaha untuk memanfaatkan segala potensi yang ada, berupa sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, pengalaman, tokoh masyarakat atau sesepuh desa, sumber daya alam serta sumber dana seperti bantuan desa (Bandes), jaring pengaman sosial (JPS) serta swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Dalam rangka peningkatan integritas, LKMD Kota Gorontalo berusaha untuk melaksanakan setiap rencana pembangunan yang telah disetujui bersama dengan cara ikut serta dalam pengendalian pembangunan bersama pembina maupun dinas / instansi terkait lainnya.
- d. Bahwa LKMD Kota Gorontalo telah mampu menginventarisir sekaligus mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan maupun tingkat keberdayannya, seperti kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kesejahteraan dan moral.
- e. Bahwa LKMD kota Gorontalo telah mampu mengemukakan kritik secara berani dan transparan tentang kelemahan LKMD selama ini serta mengemukakan saran-saran dalam rangka pemberdayaan maupun tingkat keberdayaannya baik menyangkut pengurus, pembina maupun sumber daya lainnya.
- f. Bahwa pemberdayaan LKMD Kota Gorontalo bagi pembangunan masyarakat lokal, cenderung mempengaruhi perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan maupun peningkatan pendapatan, yang sifatnya temporer dan terbatas pada mereka yang memiliki keterampilan tertentu saja.
- g. Bahwa hasil penelitian ini belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian tentang pemberdayaan LKMD bagi pembangunan masyarakat lokal di Kota Gorontalo.

2. Saran

- a. Pemberdayaan LKMD Kota Gorontalo masih perlu untuk ditingkatkan dengan cara meyakinkan dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada mereka sebagai perwujudan mitra kerja pemerintah desa/kelurahan. Sebagai mitra kerja, mereka harus mampu mengetahui segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melihat permasalahan dan potensi di kelurahan, mampu mengelola pembangunan, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam arti pula harus memiliki visi, misi dan program yang jelas sesuai kebutuhan yang mendesak dan berkesinambungan. Kemampuan ini dapat diperoleh dengan meningkatkan kualitas pribadi masing-masing.
- b. Agar keberdayaan itu meningkat, maka LKMD harus mampu menginventarisir berbagai masalah dan potensi yang ada secara maksimal di kelurahan, meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dengan cara selalu mengikuti pembinaan, penataran, pelatihan, diskusi, seminar, rapat kerja. Peningkatan tersebut tak lepas dari aktivitas pembinaan, penguasaan masalah-masalah aktual oleh pembina, metode pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan transparan.
- c. Integritas LKMD perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan wawasannya melalui pertemuan-pertemuan berkala baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat II bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut, perlu diwujudkan dalam bentuk pilot proyek percontohan.
- d. Keberanian LKMD dalam mengemukakan kritik membangun harus tetap ditumbuhkan dan dipelihara dengan cara memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada mereka untuk mengemukakannya baik secara tertulis maupun lisan, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.
- e. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi pemberdayaan LKMD harus diatasi secara sungguh-sungguh bersama masyarakat dengan memperhatikan masukan atau saran-saran dari pembina terutama masyarakat setempat, baik menyangkut kualitas sumber daya, kesejahteraan maupun moral, dengan cara menginventarisir semua masukan atau saran-saran, dikategorikan tingkat urgensinya, dimusyawarahkan guna dicarikan jalan keluarnya dan dibuatkan dalam format khusus untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.
- f. Peningkatan keberdayaan LKMD yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan maupun peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara memanfaatkan segala sumber daya / potensi yang ada di kelurahan itu semaksimal mungkin yang didukung oleh dana yang memadai serta swadaya masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agrawal A.N., 1980, *Economic Planning*, Vikas Publishing House PVT LTD India.
- Arikunto Suharsimi, 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prak-tek*, Bina Aksara, Jakarta.
- Arndth H.W, 1991, *Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Blakely Edward J, 1991, *Planning Local Economic Development Theory and Practice*, Sage Publications, Newbury Park London New Delhi.
- Hamid Syarwan, 1998, *Surat Edaran No. 411.2/2441/SJ*, Menteri Dalam Negeri RJ, Jakarta.
- Higgins Benyamin, 1968, *Economic Development Principles, Problems and Policies*, W.W. Norton, New York.
- Jhingan M.L., 1994, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kartasmita Ginanjar, 1996, **Pembangunan Untuk Rakyat**, PT. Pustaka, Gidesindo, Jakarta.
-, 1996, **Pembaruan dan Pemberdayaan**, Ikatan Alumni ITB, Jakarta.
- Moleong Lexy J., 1995 **Metode Penelitian Kualitatif**, P.T. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Myrdal Gunnar, 1970, **Objectivity in Social Research**, Gerald Duckworth & Company Limited, 3 Henritte Street, London, WC2.
- Poli W.I.M., 1994/1995, **Bahan Bacaan Ekonomi Pembangunan**, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
-, 1996, **Berpikir Global dan Bertindak Lokal**, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
-, 1997/1998, **Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Lokal**, Ujung Pandang.
-, 1998, **Kumpulan Bacaan Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah**, Ujung Pandang.
-, 1998, **Kumpulan Gagasan Pembangunan Kawasan Perkotaan Menuju Abad 21**, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Slamet Y., 1992., **Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi**, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Soekartawi, 1990, **Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan**, Raja-wali Press, Jakarta.
- Tiebout Charles M, 1962, **The Community Economic Base Study**, Committee For Economic Development, Washington.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1994, **Perencanaan Pembangunan**, Haji Masagung, Jakarta.
- Tjokrowinoto, 1996, **Pembangunan, Dilema dan Tantangan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tuloli Jassin, 1993, **Metode Penelitian Kualitatif dan Aplikasinya**, Usaha Rahmah, Manado.
- Waterson Albert, 1979, **Development Planning**, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London.